

Prof. Dr. H. Mansyur Achmad KM, M.Si
Saifuddin Al Mughniy



JALAN TERJAL DEMOKRASI

Prolog :

Prof. Dr. Drs. Hironimus Rowa, M.Si

Prof. Dr. Drs. Muh Ilham, M.Si



JALAN TERJAL DEMOKRASI

Prof. Dr. H. Mansyur Achmad, KM, M.Si
Saifuddin Al Mughniy

Petuah,

"Kalau anda bukan anak seorang raja yang hebat,
kalau anda bukan anak seorang ulama besar, maka menulislah"

(Imam Al Ghazali)



PENERBIT KBM INDONESIA

adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air Indonesia, serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku.

JALAN TERJAL DEMOKRASI

*Copyright @2025 Prof. Dr. H. Mansyur Achmad, KM, M.Si dan
Saifuddin Al Mughniy*

All right reserved

Penulis

Prof. Dr. H. Mansyur Achmad, KM, M.Si
Saifuddin Al Mughniy

Desain Sampul

Aswan Kreatif

Tata Letak

Husnud Diniyah

Editor

Dr. Muhamad Husein Maruahey, Drs., M.Sc.

Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit KBM Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>
www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

@penerbit.kbmindonesia
@penerbitbukujogja

ISBN: 978-634-202-580-2

Cetakan ke-1, Juli 2025

14 x 20 cm, xvi + 276 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-
Kemenkumham dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- i. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- ii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- iii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- iv. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PENGANTAR PENULIS

DEMOKRASI yang terus mengalami fase-fase perkembangan dan pertumbuhan dengan dinamikanya sendiri. Demokrasi yang menjadi pilihan dalam sistem bernegara yang meletakkan prinsip-prinsip populisme, culture serta value dalam kehidupan ber-warga negara. Di hampir separoh dunia menjadikan sistem demokrasi sebagai instrumen politik untuk menata sistem pemerintahan yang ideal. Prinsip kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar untuk membangun peradaban demokrasi menjadi sangat penting-- untuk menemukan konsep ideal dalam *Good Governance*.

Prinsip dan tata nilai dalam bernegara—berfluktuatif tergantung geopolitik yang berkembang di satu negara yang mempraktekkan sistem demokrasi sebagai jalan tengah. Karena teori-teori politik modern pun mengalami banyak pergeseran di dalam membersamai kemajemukan di tubuh demokrasi yang kian flural. Sehingga dialektika akademik tentang sistem demokrasi dan politik modern mengalami perkembangan sejalan dengan tumbuhnya partisipasi politik warga negara.

Sejalan dengan itu, Chantall Mouffe dengan Jean Baudrillard dalam "*Agony of power*"nya tentu berbeda dalam memahami sebuah makna maupun realitas yang ada dalam kehidupan masyarakat. Baudrillard dengan menetengahkan tentang "Dominasi, Hegemoni, dan Teror" adalah bagian penting bagi Baudrillard untuk melihat aspek-aspek lain dalam kuasa. Tetapi Mouffe berbeda dalam meresponnya terutama dalam kategori politik dan kekuasaan.

Maka dapat disimak---*Agony* artinya sebuah situasi konflik yang diperbolehkan, tidak disangkal keberadaannya, dan tidak perlu diatasi demi sebuah konsensus. Tujuan Mouffe di sini adalah menghindari eksklusi dan mengusahakan inklusi semaksimal mungkin. Hal ini berkaitan dengan rasionalitas yang menjadi basis pluralisme Rawlsian, yang dengan mengistimewakan rasionalitas yang telah mengabaikan faktor sentral dari *passions* dan *emotions* dalam mewujudkan kesetiaan terhadap nilai-nilai demokrasi.

Bagi Mouffe, penekanan pada penalaran (*reasoning*) yang mewujud dalam perbedaan antara yang *reasonable* dan *unreasonable* adalah penegasan tembok batas antara mereka yang menerima prinsip-prinsip liberal dan mereka yang menolaknya. Selain itu, penekanan yang berlebihan pada konsensus dan, pada saat yang sama, keengganan untuk berkonfrontasi akan berakibat pada ketidakpuasan dan sikap apatis terhadap partisipasi politik.

Lebih jauh, Mouffe memetakan perbedaan antara yang politis (*the political*) dan politik (*politics*) itu sendiri untuk menguji kembali model politik demokrasi liberal. Baginya, *the political* adalah dimensi antagonisme yang selalu ada dalam interaksi manusia sehingga tidak boleh dihapus dengan konsensus. Sementara itu, *politics* adalah seperangkat

praktik, diskursus, dan institusi yang mengatur kehidupan dalam kondisi yang selalu konfliktual. Fungsi dari politik adalah berhadapan dengan 'lawan' (*adversary*) dan bukan menyingkirkan mereka. Politik berusaha untuk mewujudkan persatuan (*unity*) atau apa yang disebut sebagai ke-kita-an (*an us*) dalam konteks keberagaman yang konfliktual itu.

Jika antagonisme melihat yang lain sebagai musuh (*enemies*), agonisme melihat yang lain sebagai lawan (*adversaries*) yang idenya dapat didebat, tetapi haknya untuk mempertahankan ide tersebut tidak boleh diganggu. Untuk itu, *the political* harus berusaha untuk menyediakan sarana berekspresi demi mengubah antagonisme menjadi agonisme. Dengan demikian, terwujudnya sebuah demokrasi tergantung pada konfrontasi agonistik yang terjadi di dalamnya.

Dalam demokrasi, konsensus hanya diperlukan untuk hal-hal yang bersifat prinsipil seperti konsep keadilan, kebebasan, dan kesetaraan. Selain daripada itu, konsensus konfliktual harus menyediakan ruang bagi beragam model interpretasi seperti interpretasi liberal, konservatif, sosio-demokratis, dan lain-lain. Bahaya dari ketiadaan konflik-konflik politis semacam itu adalah timbulnya bentrokan politik identitas. Sebagaimana ditegaskan Mouffe, setiap identitas mesti dipahami sebagai suatu hal yang relasional dan afirmasi terhadap perbedaan adalah sebuah prasyarat bagi eksistensi sebuah identitas.

Bagi Mouffe, agonisme harus meradikalisasi demokrasi tanpa rekonsiliasi akhir. Radikalisasi ini dilakukan dengan mengakui kenyataan keberagaman yang ada, menantang hegemoni, dominasi dan teror, dan memastikan ketersediaan pilihan-pilihan.

Pertama, ketika demokrasi liberal dan deliberatif berusaha membangun konsensus dengan cara menekan pandangan-pandangan berbeda yang kalah dalam proses *reasoning*, demokrasi radikal tidak hanya menerima perbedaan, ketidaksepakatan, dan antagonisme, tetapi bahkan bergantung sepenuhnya terhadap hal-hal tersebut.

Kedua, demokrasi radikal mengasumsikan bahwa setiap orde selalu merupakan sebuah ekspresi dari konfigurasi partikular sebuah relasi kuasa. Artinya hegemoni akan selalu ada. Adanya relasi kuasa yang bersifat menekan ini harus ditampilkan, dinegosiasikan kembali, dan diubah. Dengan merawat perbedaan dan ketidaksepakatan dalam demokrasi, hegemoni semacam ini dapat menampilkan dirinya secara terbuka sehingga dapat ditantang dan digugat.

Ketiga, pengakuan akan keberbedaan dan hegemoni memberikan pilihan-pilihan bagi warga untuk bernegosiasi bahkan menggugat hegemoni tersebut untuk ditransformasi dan diganti dengan bentuk hegemoni baru yang kemudian secara sirkular akan digugat kembali. Dengan demikian, jika demokrasi menghindari atau menafikan realitas-realitas ini, maka tidak akan muncul kesempatan untuk menantang hegemoni dominan dan mentransformasi relasi kuasa yang sedang berlangsung.

Indonesia di dalam hal ini, dapat dilihat bagaimana dimensi antagonistik yang sejatinya telah diusahakan oleh pendiri bangsa untuk ditransformasi menjadi agonistik justru dibatalkan dengan dalil keamanan dan penghindaran akan konfrontasi antargolongan, yang sebenarnya justru merupakan salah satu pilar utama berdemokrasi. Setelahnya, hegemoni ini tidak pernah ditampilkan secara telanjang

sehingga sangat kecil ruang bagi publik untuk menentangnya apalagi mentransformasikannya.

Belum lagi, mereka yang berbeda bahkan dilihat bukan sebagai lawan (*adversaries*) yang harus dijamin haknya untuk mempertahankan gagasannya, melainkan sebagai musuh (*enemies*) yang harus di lawan dengan jargon anti-Pancasila, misalnya. Model berdemokrasi semacam ini bahkan tidak memenuhi kriteria model Rawlsian atau An-Na'im yang menghendaki agar argumentasi religius disampaikan dalam bahasa publik/sipil agar deliberasi atau proses *reasoning* dapat dimungkinkan.

Dalam politik ekonomi, ide pembangunan menjadi yang cukup sentral hampir di setiap era pemerintahan. Namun, tidak berbeda dengan isu sebelumnya, ide tentang pembangunan yang sejatinya berada dalam ruang antagonistik telah dihomogenisasi. Dengan berkiblat pada ide pembangunan barat yang dominan dalam persaingan global, pembangunan di pahami sekadar dalam isu infrastruktur. Pembangunan manusia yang sering dinarasikan sebagai kebutuhan fundamental yang perlu diprioritaskan justru di pahami sebagai usaha membentuk manusia sebagai individu yang produktif dan mampu diadu dalam persaingan pasar.

Dimensi kultural dari pembangunan dan manusia itu sendiri cenderung terabaikan. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana pemerataan pembangunan diterjemahkan menjadi penyamaan (homogenisasi) pembangunan. Padahal, setiap daerah di Indonesia memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai pembangunan dan pemenuhan kebutuhan.

Isu lain adalah model pembangunan infrastruktur yang mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan hidup yang

sejatinya telah memiliki modal kultural yang besar dari komunitas-komunitas lokal dan kehidupannya yang selalu berorientasi pada keseimbangan kosmos. Namun demikian, oligarki, sebagai faktor paling berpengaruh dari semua isu ini menjadi tak tersentuh, karena keberadaannya selalu tersembunyi dibalik aktor-aktor populis sehingga hegemoninya tidak dapat ditantang secara terbuka, apalagi ditransformasikan.

Dengan demikian, telah ditunjukkan urgensi dari sebuah konsensus dan hegemoni dalam demokrasi. Hegemoni dalam pluralisme agonistik ala Mouffe sekilas terlihat tak ada bedanya dengan konsensus ala Rawls yang berujung pada eksklusi. Namun, sebenarnya ada perbedaan yang cukup mendasar, yakni bahwa, yang pertama berusaha untuk mencapai konsensus dengan menafikan hadirnya sebuah hegemoni di antara mereka yang pandangannya disepakati dalam *public reasoning* dengan mereka yang pandangannya ditolak namun harus menerima konsensus tersebut, sehingga berujung pada pelanggaran hegemoni, sementara dalam pluralisme agonistik, hegemoni itu di tampilkan secara telanjang di hadapan publik, ini sebuah kekeliruan.

Dalam teori politik yang disebut dengan "*Political agency*" ada kecendrungan dominasi, hegemoni dan teror menjadi penting ada di tengah masyarakat yang lemah. Menghadirkan oligarki misalnya dengan dominasi uang, hegemoni kekuasaan, dan teror aparat atau kelompok tertentu adalah hal yang sangat menakutkan pada dimensi kultural masyarakat. Berapa banyak tanah-tanah rakyat yang dirampas atas nama pembangunan? Penyerobotan wilayah, pembalakan hutan, illegal mining, illegal fishing, sengketa agraria--semua itu adalah politik antagonisme.

Dominasi dan hegemoni dalam politik termasuk demokrasi adalah menjadi penting dalam diskursus Rawls, Mouffe dan Jean Baudrillard dalam *Agony of power*. Di tengah indeks demokrasi yang menurun ditengarai akibat korupsi, supremasi hukum yang melemah, tatanan ekonomi yang tidak stabil, sistem sosial yang carut marut—semua itu berefek pada kondisi demokrasi yang sedang tidak baik-baik saja. Karena itu, antagonisme politik harus disudahi dengan membangun peradaban politik yang humanis, populis dan lebih bermartabat.

Hingga pada akhirnya untuk sampai di puncak peradaban demokrasi itu tidaklah mudah, jalannya berkelok-kelok, penuh intrik, dan itulah jalan terjal demokrasi saat ini. Tetapi optimisme tetap harus dibangun dan ditumbuhkan sebagai manifestasi dari kesadaran kolektif dan kesadaran akademik menuju cita-cita Indonesia Emas 2045 mendatang.

"Ketika politik mengajarkan bahwa tugas politikus sesungguhnya melaksanakan kehendak rakyat, namun yang terjadi mereka hanya mementingkan dirinya sendiri"---
(**Joseph Schumpeter**)

Jakarta, 5 Februari 2025

Penulis,

Saifuddin Al Mughniy

Prof. Dr. H. Mansyur Achmad, KM, M.Si

PROLOG

"JALAN TERJAL DEMOKRASI"

Oleh :

Prof. Dr. Drs. Hironimus Rowa, M.Si

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi IPDN
Kemendagri RI

FRANCIS Fukuyama dalam satu bukunya yang berjudul *The end of history and the Last Man* yang diterbitkan tahun 1992, sebagai rangkaian memperluas esai-esainya tahun 1989 yang diterbitkan di Kajian Internasional The National Interest. Di bagian buku ini ada sebaikt kalimat yang penah diungkapkan "*bahwa demokrasi itu adalah perkara ummat manusia sejagat*" dasar pernyataan ini tentu tumpuan bagi kemenangan kapitalisme dalam esai *The end of history*. Fukuyama begitu yakin bahwa kemenangan kapitalisme menyudahi sejarah panjang pertentangan ideologi. Sekalipun di bagian yang lain ada kelompok (khilafah) menyebutnya bahwa kapitalisme adalah jalan panjang perusakan ummat manusia.

Namun terlepas daripada itu, Fukuyama sudah menaruh perhatian besar terhadap perkembangan demokrasi sebagai jalan ketiga "*The Third way*" sebagaimana pikiran Anthony Giddens. Kemenangan kapitalisme tentu bukanlah finalisasi dari perkembangan demokrasi, tetapi paling tidak konstruksi dalam tatanan kehidupan manusia; yang diatur oleh hukum negara, cara berwarga negara, membangun toleransi,

mewujudkan kesejahteraan, keamanan serta perdamaian dunia.

Dalam fase pertentangan ideologi dunia menjadi penting untuk melihat secara utuh, apa itu demokrasi, untuk apa ia ada, bagaimana peran dan fungsinya, serta apa dampaknya terhadap peradaban umat manusia. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah akumulatif untuk memahami demokrasi secara benar dan ideal. Secara normatif *demos-kratos* diterjemahkan sebagai bentuk pemerintahan rakyat—kedaulatan ada di tangan rakyat. Artinya terlalu naif bila kemudian demokrasi mengalami destruktif sehingga menjelma menjadi otoritarianisme, kedaulatan dikendalikan oleh “rezim atau penguasa” padahal dalam sejarah panjang pergolakan pemikiran terkait bagaimana hak-hak politik rakyat itu kembali ke tangan rakyat—adalah cara melawan *otoritarianisme*.

Ini kemudian menjadi penting sebagai catatan bahwa demokrasi itu tumbuh dan berkembang sejalan dengan tumbuhnya kesadaran kolektif (*Collective Consciousness*) umat manusia (warga manusia) dalam tatanan yang lebih baik dan ideal. Kiranya dapat dipahami sebagai konsekuensi dari sejarah umat manusia. Sebagaimana pernyataan Erich Fromm "*Sejarah umat manusia lahir karena ketidakpatuhan, dan bisa jadi sejarah umat manusia akan mati karena kepatuhan*" ini bisa ditafsirkan bahwa perkara demokrasi adalah perkara tentang patuh atau tidak patuh pada struktur sosial (warga negara) yang diatur oleh konstitusional dalam negara. Sehingga negara harus hadir memberi rasa aman, mewujudkan kesejahteraan sosial, kemakmuran bagi seluruh rakyat, kesemua itu adalah tindakan untuk mewujudkan

kepatuhan secara holistik baik secara individu maupun secara kolektif.

Karena itu demokrasi adalah satu sistem sosial dan politik yang akan mengatur keteraturan sosial (kepatuhan) bagi warga negara. Bahwa kemudian demokrasi tidak menginginkan terjadinya perilaku *disobedience* (pembangkangan), destruktif—barbarianisme, makar serta kejahatan politik (*political crime*), sikap individualisme, sektarian, korupsi di dalam negara. Karena demokrasi menginginkan adanya peradaban yang ideal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun di sisi faktual, kita seringkali merasakan praktek demokrasi jauh dari konsep ideal, justru “demokrasi” hanya menjadi *bakul jualan* untuk kepentingan politik tertentu. Demokrasi terasa menemui ajalnya sebagaimana Zilbatt mempertanyakannya “*How Democratie Die*” mengapa demokrasi mati. Inilah hari-hari yang mencemaskan apakah demokrasi tetap ideal atau tidak untuk melanjutkan mengatur ummat manusia. David Runciman (Professor Politik dari Cambridge University) mengatakan “*Demokrasi ibarat penyakit, maka penyakitnya sudah benar, hanya pada pasien yang salah*”

Dan saat ini kita sedang berada di “**Jalan Terjal Demokrasi**” proses politik yang berbiaya mahal, politik transaksional, lemahnya *law enforcement*, angka kemiskinan dan pengangguran yang semakin meningkat, kondisi ekonomi yang tidak sedang baik-baik saja, penyakit-penyakit sosial mewabah menggerogoti jantung struktur sosial (judi online, narkoba, kejahatan seksualitas), kekerasan terhadap perempuan, aparat penegak hukum yang saling bunuh---kesemuanya itu menjadi ancaman serius untuk

mengembalikan marwah dan hakekat demokrasi yang sesungguhnya.

Maka untuk mewujudkan itu tidak cukup dengan *The Political Will*, tetapi langkah konkrit dengan kebijakan negara dengan tujuan untuk menormalisasikan semua segmentasi kehidupan manusia (warga negara) dalam tatanan yang ideal dalam peradaban demokrasi. Kalau itu tidak dilakukan, maka Demokrasi tetap di jalan yang terjal.

----Dan akhirnya saya ucapkan, selamat kepada penulisnya atas karya tersebut, semoga karya ini dapat memberikan edukasi dalam peradaban demokrasi kita.

Jakarta, 5 Februari 2025

Prof. Dr. Drs. Hironimus Rowa, M.Si

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi IPDN
Kemendagri RI

TESTIMONI

Prof. Dr. Drs. Muh Ilham, M.Si

Direktur Sekolah Pascasarjana IPDN Kemendagri RI

JALAN TERJAL **DEMOKRASI**—ini bukan sekedar judul opini, tetapi kalimat itu mengandung satu diksi besar tentang demokrasi dan dinamikanya yang secara terus menerus tumbuh dan berkembang. Indonesia salah satu negara demokrasi terbesar ke 4 di dunia. Reformasi politik tahun 98 adalah bejana besar dalam perjuangan untuk mengembalikan demokrasi ke habitusnya setelah kurang lebih 32 tahun lamanya berada di kubangan otoritarianisme—despotisme kekuasaan. Pergeseran kekuasaan pada akhirnya berhasil membawa demokrasi kejantung peradaban politik Indonesia.

Demokrasi sebagai tujuan dan cita-cita politik Indonesia yang lebih populis, humanis, transparansi dan transformatif sangat mungkin diwujudkan melalui kesadaran kolektif kebangsaan demi mengembalikan hak-hak politik rakyat yang sesungguhnya. Sekalipun hal ini tidak mudah mengingat reformasi politik tidak seluruhnya membersihkan “*sampah sejarah masa lalu*” sehingga perilaku politik semacam ini acapkali masih bercokol di tubuh pemerintahan dan

kekuasaan. Sehingga masih ada kecenderungan menghambat jalan demokrasi yang ideal itu tadi.

Praktek politik Indonesia pasca reformasi politik 98 seakan memberi angin segar akan bangkitnya peradaban demokrasi yang lebih baik. Tetapi kenyataannya semakin ke sini, secara kontekstual “demokrasi terpasung” dikepung oleh para oligarki dan politisi yang berjubah demokrasi. Instrumen demokrasi seperti partai politik juga mengalami stagnasi dan *distrust publik* (ketidakpercayaan publik) akibat perilaku politik menghalalkan segala cara demi tujuan kekuasaan. Konsep ideal demos-kratos tergerus secara perlahan, dan bisa saja akan menemui kematiannya.

Ini kekhawatiran, dengan melihat fenomena politik saat ini. Bagaimana konstitusi dibegal, produk undang-undang diubah, transaksi kasus hukum diperjualbelikan dan beberapa kejahatan politik lainnya (*The political crime*) yang cenderung merusak tatanan ideal dalam demokrasi. tentunya ini akan menjadi catatan penting bagi kita untuk secara bersama-sama bergerak dan bertumbuh untuk memajukan peradaban demokrasi yang bukan hanya secara tekstual tetapi juga secara kontekstual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Karena itu, buku yang berjudul “*Jalan terjal Demokrasi*” ini patut kita apresiasi sebagai karya monumental yang merespon secara apik, lugas, ideal, akademis—dengan harapan karya tersebut dapat memberi edukasi dan kesadaran kita semua tentang demokrasi yang ideal dalam politik Indonesia.

Selamat kepada penulisnya—teruslah berkarya demi Indonesia.

Jakarta, 5 Februari 2025

Prof. Dr. Drs. Muh Ilham, M.Si

Direktur Sekolah Pascasarjana IPDN Kemendagri RI

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS.....	i
PROLOG.....	viii
TESTIMONI	xii
DAFTAR ISI	xv
DEMOKRASI SALING MENJEGAL	1
SEPERTI TERBUNUHNYA JULIO CAESAR	8
FENOMENA DEPARPOLISASI	14
DEMOKRASI BERBIAYA MAHAL.....	21
DEMOKRASI TRANSAKSIONAL.....	28
DEMOKRASI: JALAN TENGAH	36
HERMENEUTIKA DALAM DEMOKRASI.....	42
POLITIK ETIS DALAM DEMOKRASI	48
DIANTARA DOGMA DAN STIGMA KEKUASAAN	55
TRAGEDI DALAM DEMOKRASI	61
POLITIK MORAL DALAM TRANSISI DEMOKRASI.....	69
TRANSISI DEMOKRASI: TAK ADA KOALISI PERMANEN	76
SALES POLITIK DALAM RUANG DEMOKRASI.....	83

MELANJUTKAN TRADISI DEMOKRASI MASA LALU	88
MAHAR POLITIK DAN CITRA PARPOL.....	100
POLARISASI DALAM DEMOKRASI	104
PERTARUNGAN MACAN DENGAN KUCING.....	112
POLITIK SIMULAKRA, FANTASI DAN CITRA DIRI	120
PERGESERAN KEKUASAAN	126
ORCHESTRA KEMATIAN DEMOKRASI	133
OLIGARKI DAN BAHAYA BAGI DEMOKRASI.....	138
NOAM CHOMSKY; MASA DEPAN DEMOKRASI.....	145
GAGALNYA NEGARA; KEMUNDURAN DEMOKRASI	155
THE POLITICAL CRIME	161
LIBIDO KUASA, DAN DISTRUST PUBLIK	167
MEMBAKAR KRITIK, PADAHAL INI DEMOKRASI	173
MEMBACA LEGITIMASI POLITIK	183
SAKITKAH DEMOKRASI?	188
"GAYA SAMBA" JOKOWI DI PILKADA 2024	193
DEMOKRASI; THE AGONY OF POWER.....	203
DEMOKRASI BERMUKA DUA.....	208
KABINET GEMUK DI KOALISI GEMOY.....	213
KOTAK KOSONG JALAN TERJAL DEMOKRASI	221
MEMBONGKAR DOMINASI DAN AMBISI.....	230
POLITISI DEMAGOGI DAN NARCISISME	237
MENGEMBALIKAN PILKADA KE DPRD, SOLUSI ATAU ANCAMAN	245
DAFTAR PUSTAKA.....	253
BIODATA PENULIS	257

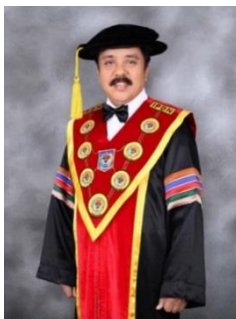
DAFTAR PUSTAKA

- Albert, Hans, 2014, *Rekonstruksi Nalar Kritis*, IRCiSoD, Yogyakarta.
- Al mughniy, saifuddin, 2016, *Politik Tanpa Identitas*, Sunrise, Yogyakarta.
- Attali, Jacques, 1999, *Millenium Ketiga*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Baudrillard, Jean, 1978 versi berbahasa Inggris. 2021 versi bahasa Indonesia, BasaBasi. Bantul, Yogyakarta.
- Bintang Mayang Sari. (2012). *Metafora dalam Pidato Charles De Gaulle Pada pErang Dunia II*. Universitas Indonesia.
- Budiardjo, Merriam, 2008, *Dasar-dasar ilmu politik*, Gramedia utama, Jakarta.
- Budi, Nugroho Wahyu, 2013, *Orang lain adalah neraka, Filsafat Eksistensialisme Jean Paul Sartre*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- B. Guy Peters, *Bureaucracy and Democracy*, SOG Conference November 2008, University of Pittsburgh.

- Belger, L Peter, Thomas Luckmann, 1990, *Tafsir sosial atas kenyataan*, LP3ES, Jakarta.
- Camus, Albert, 2013. *Krisis kebebasan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Crisnandi, Yudhi, Dr, 2008, *Beyond Parlement*, Transwacana, Jakarta.
- Damsar, 2010, *Pengantar Sosiologi Politik*, kencana, Jakarta.
- Dahl, Robert, 1974, *The Political System*
- Dahl, Robert, 1961, *who governst democracy in power an American City*, New Haven, Yale University Press.
- Easton, David, 1981, *The Political System*, Chicago University Press.
- Forrest Vern Morgenson III, *Reconciling Democracy and Bureaucracy: Towards a Deliberative-Democratic Model of Bureaucratic Accountability*, Doctor of Philosophy Dissertation, University of Pittsburgh, 2005.
- Fathur Rokhman dan Surahmat. (2016). *Politik Bahasa Pengusaha*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Fukuyama, Francis, 2002, *TRUST, kebijakan sosial dan penciptaan kemakmuran*, Qalam, Yogyakarta.
- Giddens, Anthony, 1995, *The Constitusion of Society*, Polity, Press Cambridge.
- Harari, Yuval Noah, 2018, *Homo Deus, Masa Depan Umat Manusia*, Alvabet, Tangerang Selatan.
- Helder, Dom Camara, 2000, *Spiral kekerasan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Huntington P. Samuel, 1992, *Benturan Peradaban (Class Civilitation)*
- Huntington P Samuel, 1983, *Tertib politik dalam masyarakat yang sedang berubah*,

- Ishiyama T, John, Marijke Breuning, 2013, *Ilmu Politik, dalam Paradigma Abad ke 21*, Volume I, Kencana, Prenada Media Group, Jakarta.
- Khan, S, Joel, 2016, *Kultur, Multikultur, Postkultur*, INSIST Press, Yogyakarta.
- Khun, Thomas, 1992, *The structure scientific revolution*.
- Kristeva, Julia, 2021, *Bangsa tanpa nasionalisme*, BasaBasi, Bantul, Yogyakarta.
- Kuntowidjoyo, Dr, 1995. *Birokrasi dan budaya demokrasi*, Qalam, Yogyakarta.
- Levitsky, Steven & Daniel Ziblatt, 2019, *How Democratie Die*, PT. Gramedia Utama, Jakarta.
- Londrogen, Jhon, B, 2000, *Legislative Institutions and Ideology in Chile*, Cambridge University Press.
- Magnis, Suseno Franz, 2015, *Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme, Bunga Rampai Etika Politik Aktual*, Kompas Media, Jakarta.
- Van Bruinessen, Martin, 2013, *Rakyat Kecil, Islam dan Politik*, Penerbit Gading, Yogyakarta.
- Dan beberapa artikel lainnya baik dari media cetak maupun dari media online.

BIODATA PENULIS



RIWAYAT HIDUP (CURRICULUM VITAE)

I. IDENTITAS PERIBADI

Nama : **Prof. Dr. Drs. H. Mansyur Achmad, M.Si**
NIP : 196112311989101001
N I D N : 3431126161
Tempat dan tanggal lahir : Cakke, 05 Februari 1961
Pangkat dan Golongan : Pembina Utama Muda/IV.c
Jabatan : Guru Besar
Pekerjaan : Dosen IPDN– KEMENDAGRI
Jakarta
Agama : Islam
Alamat : Kampus IPDN Blok A No.22
Jl.Ampera Raya No.1 Cilandak
Timur, Pasar Minggu, Jakarta
Selatan.
Email/HP : mansyurachmadipdn@gmail.com
HP: : +6 281322111400

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. **Sekolah Dasar** Negeri No.58 Mampu Tamat Tahun 1973
2. **Sekolah Menengah Pertama** Negeri No.452 Cakke Tamat Tahun 1976
3. **Sekolah Menengah Tingkat Atas** Negeri No.229 Cakke Tamat Tahun 1980
4. **SARJANA MUDA** Ilmu Administrasi Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Ujung Pandang Tamat Tahun 1984
5. **SARJANA LENGKAP** Jurusan Ilmu Administrasi Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Ujung pandang Tamat Tahun 1986
6. **PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER SAINS (S2)** Bidang Kajian Utama Administrasi Pemangunan Universitas Hasanuddin (UNHAS) Ujung Pandang Tamat Tahun 1996
7. **PASCASARJANA PROGRAM DOKTOR (S.3)** Bidang Kajian Utama Ilmu Administrasi Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung Tamat Tahun 2003.
8. Pendidikan **DIPLOMA** tentang Human Right and Conflict Transformation Training the Norwegian Center for Human Right at University of OSLO. Di Puncak – Indonesia November s/d Desember 2004. Di OSLO and di Kota Lillehammer dan **University of Oslo Norwegia**, Juni 2005.

III. RIWAYAT PEKERJAAN

1. **Dosen** Yayasan pada Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Ujung Pandang, tahun 1987.
2. **Dosen Kopertis** Wilayah IX (Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya) dipekerjakan pada Universitas Veteran RI

Ujung Pandang, tahun 1989.

3. **Dosen Tetap** pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) DEPdagRI Jakarta sejak tahun 2005.
4. **Instruktur** pada: Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PUSDIKLAT DEPdagRI- JAKARTA), sejak tahun 2005.
5. **Dosen** Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia (STIAMI) Jakarta sejak tahun 2013.
6. **Dosen** Pascasarjana Universitas Krisna Dwipayana (UNKRIS) Jakarta sejak tahun 2013.
7. **Dosen** Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Menara Siswa Bekasi sejak tahun 2012.
8. **Dosen** Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten sejak tahun 2011.
9. **Dosen** Pascasarjana Program Doktor (S3) Universitas Negeri Makassar sejak tahun 2012.
10. **Dosen** Pascasarjana Universitas Eka Sakti (UNES) Padang sejak Tahun 2013.
11. **Dosen** Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) Banten sejak Tahun 2015 – sekarang.
12. **Anggota Senat** Perguruan Tinggi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN Kemendagri RI) 2019 - 2022
13. **Sekretaris Program Doktor** Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN Kemendagri RI) 2020-2021
14. **Ketua Program Doktor** Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN Kemendagri RI) 2021- sekarang

IV. PENGALAMAN ORGANISASI

1. **SEKRETARIS** LAPELMI HMI Cabang Ujung Pandang tahun 1986.
2. **SEKRETARIS UMUM** Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Islam Indonesia (DPD AMII) Tingkat I Sulawesi Selatan Periode tahun 1994 – 1997.

3. **SEKRETARIS UMUM** Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Veteran Republik Indonesia (PP-IKA UVRI) Ujung Pandang, tahun 1989 –1999. (Tiga Periode Kepengurusan).
4. **KETUA DEPARTEMEN KAJIAN KEISLAMAN** Dewan Pengurus Wilayah Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPW BKPRMI) Tingkat I Sulawesi Selatan Periode tahun 1995 – 2000.
5. **KETUA ANGKATAN** Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Sains pada Universitas Hasanuddin tahun 1991.
6. **KETUA** Ikatan Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (IMPP / SENAT - UNPAD) Masa Bhakti 1997-2000.
7. **PRESIDIUM** Forum Mahasiswa Pascasarjana (WACANA) Indonesia Masa Bhakti 1999 –2001.
8. **DEWAN PAKAR** Forum Mahasiswa Pascasarjana (WACANA) Indonesia 2004 – 2006.
9. **KETUA** Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Keluarga Massenrempu (DPP HIKMA) masa bhakti 2003 – 2009.
10. **WAKIL SEKRETARIS JENDERAL** Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (BPP – KKSS) masa bhakti 2004–2009, 2009–2014, dan 2014 -2019.
11. **KETUA** Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (**ICMI**) Orwil Jakarta Megapolitan Tahun 2010 - 2015.
12. **KETUA** Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (**KAHMI**) DKI Jakarta Tahun 2010 - 2015.
13. **SEKRETARIS** Masyarakat Kybernologi Indonesia (**MKI**) Tahun 2013 – 2018.
14. **WAKIL KETUA** Departemen Ketenagakerjaan dan jaminan sosial Majelis Nasional **KAHMI** Tahun 2013 – 2018.
15. **WAKIL KETUA** Forum Doktor Institut Pemerintahan

- Dalam Negeri (**IPDN**) KEMENDAGRI Tahun 2013 – 2018.
16. **KETUA** Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (**ICMI**) Orwil Jakarta Megapolitan Tahun 2015 –2020.
 17. **Anggota** Persatuan Penembak Indonesia (**PERBAKIN**) Garuda Sakti Shooting Club Tahun 2017.
 18. **KETUA** Dep.Hubungan Antar Lembaga Negara Majelis Nasional Korps Alumni HMI (**KAHMI**) periode tahun 2018 - 2023.
 19. **WAKIL KETUA UMUM** Ikatan Alumni Universitas Veteran Republik Indonesia periode tahun 2018 – 2024.
 20. **KETUA** Dep. Pemberdayaan Pemerintahan dan Masyarakat Desa Majelis Nasional Korps Alumni (**KAHMI**) periode 2023 – 2028.
 21. **DEWAN PAKAR** Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (BPP – KKSS) masa bhakti 2019 – 2024.
 22. **WAKIL KETUA UMUM** Dewan Pimpinan Pusat Kerukunan Keluarga Massenrempulu (DPP HIKMA) Periode tahun 2021 – 2026.
 23. **WAKIL KETUA UMUM** Pengurus Besar Kerukunan Keluarga Bugis Sidenreng (PB KEBUGIS) Periode tahun 2022 – 2027.
 24. **SEKRETARIS JENDERAL** Pengurus Besar Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PB-PORDI) Masa Bhakti 2023 – 2027.
 25. **WAKIL KETUA UMUM** Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Dosen (DPP FKD) Indonesia.Tahun 2023.

V. PENATARAN/SEMINAR DAN NARASUMBER :

1. Penataran calon Penatar Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) Tingkat Nasional, di Pusat Pengembangan Sumber Daya Pemuda (PPSDP)

- Cibubur Tahun 1993.
2. Penataran Kewaspadaan Nasional (TARPADNAS) Angkatan XIV Tingkat Nasional di PPSDP Cibubur Tahun 1994.
 3. Narasumber pada Seminar Internasional SKIMIX Universitas Padjajaran (UNPAD) – Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM). Simposium Kebudayaan **Indonesia–Malaysia**, Bandung–Indonesia. Tanggal 10-12 Mei 2005.
 4. Narasumber tentang Gender dalam perspektif Otonomi Daerah di Singapura dan **Kuala Lumpur Malaysia**, Agustus 2005.
 5. Nara Sumber tentang Quovadis Otonomi Daerah di Indonesia pada *Indonesian Singapore Friendship Association* (ISFA) Negara **Singapura**, tahun 2006.
 6. Narasumber tentang Quo vadis Otonomi Daerah di Indonesia pada Perbadanan Produktiviti Negara (*National Productivity Corporation*, NPC) dan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (*Federal Department of Town and Country Planning*) dan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Semenanjung Malaysia (*Ministry of Housing and Local Government*), **Kuala Lumpur Malaysia**, September tahun 2005.
 7. Narasumber tentang Quovadis Otonomi Daerah di Indonesia pada Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (*FELDA*) di **Kuala Lumpur– Malaysia**, September tahun 2005.
 8. The First International Conference on Public Organization Management in the Era of Democratization Comparing Models in Various Countries, **Singapura**, 21-22 January 2011
 9. Seminar economics, investment cooperation & taxation

aspects Indonesia - Malaysia World Halal Research (Innovation AS Catalyst For Business Transformation) **Kuala Lumpur, Malaysia**, 3–7 April 2012.

10. International Seminar Multiliteracies in Language education, 16-18 April 2012 at the SEAMEO Regional Language Centre, **Singapore**.
11. Participant in recognition of successful completion of **ASPA** Indonesia Internasional Seminar and **IAPA** Annual Conference 2012 on "Innovative Governance", June 12th – 14 th, 2012. Faculty of Administrative Science University of Brawijaya, Malang.
12. International Halal Research, **Kuala Lumpur Malaysia**, 02 – 05 April 2013.
13. Annual Conference on Management and Social Science , April 16 –18 2013, **Bangkok Thailand**.
14. Membangun Kerjasama Pemerintah Daerah dan KKSS dengan Kedutaan Indonesia di Perth, **Australia Barat** Mart 12-18 2015.
15. International Halal CB Conference, International Expo Korea, **Seoul Korea Selatan**, Agustus 6–12 2015.
16. Bimbingan Teknis Nasional Yayasan Produk Halal Indonesia (**YPHI**)" Wajib Sertifikasi Halal Menurut Undang – Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014", Hotel Sheraton Media 5 Star, Jakarta 18– 20 November 2015.
17. **Seminar Internasional IPDN** " Mencari Format Revolusi Mental Kader Pamong Praja", Jakarta 10 Desember 2015
18. **Thailand** Halal Assembly 2015, December 25 – 27, 2015 At Queen Sirikit National Convention Center.
19. **Narasumber** Penyusunan Kebijakan dan Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pada

- Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia tahun 2015.
20. World Halal Conference 2016 Kuala Lumpur Convention Center (**KLCC**), **Malaysia** March 30 – 31 2016.
 21. **International Training** for Halal Auditor in Yarsi University, Jakarta, April 09–10 April 2016.
 22. **International Conference**“ The Challenges of Educational Management and Administration in a competitive Environment” April 15–17 2016 Grand Clarion Hotel, Makassar.
 23. **Thailand** Halal Assembly 2016, December 09 - 13, 2016 At Queen Sirikit National Convention Center.
 24. Narasumber pada **“International Conference on Multidisciplinary Academic 2017 ”**, Mei 13th, 2017 At Swiss Garden Hotel, Kuala Lumpur, **Malaysia**.
 25. **Narasumber** pada Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) **DPRD dan PEMDA** Se-Indonesia sejak Tahun **2005-2019**.
 26. **Narasumber** pada Seminar antar Bangsa Pembangunan Manusia 2017, 21 November 2017, KUIIM Malaka Malaysia.
 27. **Berbagai Seminar Internasional** diikuti sejak 2018 sampai Sekarang.

VI. HASILKARYA :

1. PENULISAN JURNAL

a. JURNAL NASIONAL

- 1) THE INFLUENCE OF EMPLOYEE PROFESSIONALISM AND COMPETENCE IN IMPROVING THE QUALITY OF EMPLOYEE SERVICE ONE STOP INTEGRATED SERVICES,

KEMBANGAN DISTRICT, WEST JAKARTA ADMINISTRATIVE CITY. Tahun **2023**.

- 2) Implementasi Kebijakan Bangga Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua. Tahun **2023**.
- 3) Analisis Implementasi Kebijakan Penyetaraan Jabatan Fungsional Tertentu Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tahun **2022**.
- 4) Pengembangan Modal Sosial Masyarakat Dalam Mewujudkan Program Makassar Tidak Rantasa. Tahun **2021**.
- 5) Implementasi Kebijakan Sistem Elektronik Surat dalam Mewujudkan Electronic Government di Provinsi Jawa Tengah. Tahun **2021**.
- 6) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM GERAKAN DESA IKUT SEJAHTERA (GADIS) DI KABUPATEN PESAWARAN. Tahun **2021**.
- 7) KOMPETENSI TENAGA PENDAMPING DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI DESA SUNGAI TUAK KECAMATAN TANAH GROGOT KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. Tahun **2021**.
- 8) Analisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Gerakan Desa Ikut Sejahtera (Gadis) Di Kabupaten Pesawaran. Tahun **2020**.
- 9) Numerical computation of theory of heat conduction for waterflow analysis. Tahun **1999**.

b. JURNAL INTERNASIONAL

- 1) The Governments' Use of Social Networking Sites (SNS) to Promote Citizens' Trust During the COVID-19: Perceived Religious Values as a Moderator. Tahun **2023.(Q1)**
- 2) The role of digital marketing, word of mouth (WoM) and service quality on purchasing decisions of online shop products. Tahun **2023.(Q2)**
- 3) Coronavirus Disease (COVID-19): A Regional Autonomy Point of View. Tahun **2020.(Q2)**
- 4) The Effect of E-Government Implementation on the Quality of Electronic Identity Card Public Service in Indonesia.Tahun **2021.(Q3)**
- 5) Territorial Geographical Boundaries In Normative Characteristics A Concrete View Of Regional Autonomy. **2020. (Q4)**
- 6) Innovative Behavior on the State Civil Apparatus. Tahun **2023.**
- 7) DilemmaofDecentralization and Local Autonomy In Indonesia. Tahun **2023.**
- 8) Government Support and Policy Design to Improve MSME's Performance. Tahun **2023.**
- 9) Implementation of Policies to Build Prosperous Papuan Generations and Families in Asmat District. Tahun **2023.**
- 10) Infrastructure Development Strategy in Increasing Connectivity Between Regions: A Case Study in North Tapanuli Regency, Indonesia. Tahun **2023.**
- 11) Implementation of Information Technology Utilization Policy in Tegal City Central Java

- Province. Tahun **2023**.
- 12) The Dynamics of Regional Autonomy in Indonesia. Tahun **2022**.
 - 13) The Collaborative Governance with Focus on Controlling the Illegal Mining in Indonesia. Tahun **2022**.
 - 14) Implementation of Papua Special Autonomic Policies for Improving Community Welfare Papua Original People (POP) in Papua Province. Tahun **2022**.
 - 15) Government Policy Solution to Build up Social Welfare by Decentralization: An Overview. Tahun **2022**.
 - 16) The Existence of State-Owned Enterprises (SOEs): A Case on Nusantara Bonded Zone of Indonesia. Tahun **2022**.
 - 17) Influence of the Extension and Tax Service to Compliance of Personal Tax in Indonesia (Study through Taxpayers in the Tax Court– Jakarta).Tahun **2022**.
 - 18) The Effect of The Implementation of Operational Education Costs on The Realization Good Governance in The Government of The DKI Jakarta Province. Tahun **2022**.
 - 19) Governance of Financial Assistance to Political Parties Based on Good Governance Principles in Indonesia. Tahun **2022**.
 - 20) Article The Energy Dynamics Of Decentralization From 2004 To 2020. Tahun **2021**.
 - 21) Empowerment of the Fisherman Community Based on Local Wisdom in the Administration District of a

- Kepulauan Seribu DKI Jakarta Province. Tahun **2021.**
- 22) Gender Mainstreaming at DPR RI during Period 2019–2024. Tahun **2021.**
 - 23) The Implementation E-Government to Increase Democratic Participation: The Use of Mobile Government. Tahun **2021.**
 - 24) Ambiguous Policy on Securing the Vital Objects of The Indonesian Armed Forces in East Java. Tahun **2021.**
 - 25) Regional Autonomy In Literature: Indonesian And International. Tahun **2020.**
 - 26) Dilemma of Decentralization and Local Autonomy in Indonesia. Tahun **2016.**
 - 27) New Paradigm of Public Service in Indonesiain Control and Responsibility Perspective. Tahun **2015.**

2. **PENULISAN BUKU**

- 1) Menulis Buku **"Teori–Teori Mutakhir Administrasi Publik"** Penerbit Rangkang Education Yogyakarta Cetakan Pertama Tahun 2010, Cetakan Kedua Thn 2011, Cetakan Ketiga Thn 2012, Cetakan ke empat Thn 2015, Cetakan Kelima Tahun 2017.
- 2) Menulis Buku **"Dilema Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Antara Tuntutan Politik dan Kebutuhan Administrasi"** Penerbit Alqa Print Jatinangor, Cakrawala Baru Dunia Buku Cetakan Pertama Tahun 2013, Cetakan Kedua Tahun 2014.

- 3) Menulis Buku "**Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa**" Penerbit Balai Pustaka Jakarta, Cetakan Pertama Tahun 2020.
- 4) Menulis Buku "**Manajemen Pelayanan Publik**" Politeknik STIA LAN Jakarta Tahun 2021.
- 5) Menulis buku "**MOBILE GOVERNMENT (Pemerintahan dan Pelayanan Publik Digital)**" Tahun 2023.
- 6) Menulis Buku "**Konsep Dasar Teori Organisasi**" Tahun 2023.
- 7) Menulis Buku "**Elemen Dasar Pemerintahan Daerah Pola Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah**" .(Dalam proses Cetak). IPDN Tahun 2023.
- 8) Menulis Buku "**Kepemimpinan Dalam Organisasi**". (Dalam Proses Editing).
- 9) Menulis Buku "**Ilmu Administrasi Publik**" Penerbit CV. Askara Sastra Media Tahun 2024
- 10) Menulis Buku "**Administrasi Pemerintahan Daerah**" Penerbit CV. Askara Sastra Media Tahun 2024

VII. PENGALAMAN MENELITI

1. Penelitian tentang Pengaruh Kepemimpinan dan Komunikasi terhadap Efektivitas Kerja Pegawai di Kantor Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar. **Lembaga Penelitian IPDN 2013.**
2. Penelitian tentang Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Perempuan dan Anak di Pedesaan (Tinjauan dari Aspek Pelayanan Prima Dan Standar

Pelayanan Minimal). **Kemendes RI 2015.**

3. Penelitian tentang Kajian *Legal Analysis* Terhadap Perubahan Undang- Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undag-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 (*Studi kasus di Kabupaten Bogor, Kota Depok dan Provinsi Banten*). **DPD RI 2015.**
4. Penelitian tentang Analisis Implementasi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat. **Lembaga penelitian IPDN 2016.**
5. Penelitian tentang Analisis Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat. **Lembaga penelitian IPDN 2018.**
6. Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Sistem Administrasi Perkantoran Maya (**siMAYA**) dalam Mewujudkan *Electronic Government* Di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. **Lembaga Penelitian IPDN 2020.**
7. Penelitian Unggulan tentang Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di Provinsi Bengkulu Eara Pandemi Covid 19 Tahun 2021. **Lembaga Penelitian IPDN 2021**



Saifuddin Al Mughniy , lahir di Sinjai, 15 Agustus 1974. Anak Kedua dari empat bersaudara. Ayah Muhammad Sain, dan ibu Andi Indotou (Almarhumah). Istri Hj. Dalimah (Almarhumah), di karuniai anak laki-laki, Abibithal Afwan Syahbani. Sebagai Dosen, Dosen Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Pernah Dosen di Universitas Veteran Republik Indonesia. Universitas Indonesia Timur. Universitas Pancasila. Unhas Fakultas Kesehatan Masyarakat untuk mata kuliah pengantar sosiologi kemasyarakatan. Juga sebagai Penggiat Academic Writing dengan berbagai sekolah kepenulisan. Pendiri Roemah Literasi titik koma Indonesia, dan pengasuh di Republik Society.

Penulis di berbagai media, baik lokal maupun nasional. Dan narasumber di berbagai media termasuk di media TV dan FGD. Anggota Forum Dosen . Pendiri Roemah Literasi TITIK KOMA Indonesia. OGIE Institute Research and Political Development. LKiS (Lembaga Kaji Isu-Isu Strategis), Tarung

Institute. Direktur Eksekutif Centrum Arete Institute. Pembina di sekolah kepenulisan Lider Phinisi dan Aufklarung School, dan Literasi Akar Rumput. Founder Ruang Kelas, Direktur Eksekutif Erzaldi Institute. Ketua Tim Pengkaji dan Peneliti Gelar Daerah (TP2GD) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Staff Khusus Gubernur bangka Belitung tahun 2021-2023. Dan Pimpinan Republik Society. Wakil Dekan IV Fakultas Ekonomi UVRI Makassar (2005). Wakil Rektor III UVRI Makassar dua periode (2006-2014). Tim Ahli Penelitian Bappeda Walikota Makassar (2006). Pengawas Keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros (2003). Dan aktif di Forum Dosen Indonesia. Peneliti di POSTODAI Indonesia.

Sejak mahasiswa aktif di berbagai lembaga baik intra maupun ekstra kampus. Ketua Senat Mahasiswa Fisipol UVRI (1995). Ketua Komisariat Fisipol Bawakaraeng UVRI (1994). Ketua Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (1996). Presidium Pengurus HMI Cabang Ujungpandang (1996). Ketua Ikatan Mahasiswa Sinjai UVRI (1997). Sekjen Bulan Sabit Merah Indonesia (1999). Ketua Umum Persaudaraan Muslim Sedunia Propinsi Sulawesi Selatan (2000). Pengurus KAHMI Sulawesi Selatan. Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kabupaten Belitung. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Kabupaten Belitung. Dewan Pakar KAHMI Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tenaga Ahli Penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Barat (2019). Pengurus Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Penceramah pada kaderisasi Pemuda Pancasila Nasional. Pengajar pada kelas kosmologi perempuan di HMI. Sekjen For Indonesia. Ketua Dewan Pembina BBO Fondation Belitung. Dewan Pembina Relawan Desa Nusantara Propinsi Bangka Belitung. Dewan Pakar Build Institute Propinsi Bangka Belitung. Dewan Pakar HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) Kabupaten Bangka.

Meretas jalan damai (Resolusi Konflik POSO), benarkah karena isu SARA? (1999). Jajak pendapat tentang Sulawesi Merdeka 1999, benarkah isu politik atau sentiment Timur-Barat (1999) bekerjasama dengan Lepas UNHAS. Pemilu, Golput adalah kepemihakan sosial politik warga Kota Makassar. (2001) bekerjasama dengan POSTODAI Indonesia. Mengurai potensi masyarakat pesisir kepulauan Pangkajene Kepulauan (2003). Memahami perilaku politik menjelang Pilkada langsung di empat kota (2004-2005). Perilaku pemilih warga kepulauan Selayar (2005). Mengurai tingkat kemiskinan kecamatan Mamajang Kota Makassar (2008). Advokasi sosial sekaligus pemetaan konflik tanah dikawasan perkebunan karet Kabupaten Bulukumba (2010-2011). Sejarah perkembangan Islam di kabupaten Sinjai (2009). Sejarah perkembangan Islam di Kabupaten Maros (2010). Sejarah perkembangan Islam di Kabupaten Gowa bekerjasama dengan Fakultas Syariah Universitas Islam Alauddin Makassar (2012). Memahami perilaku politik masyarakat pulau-pulau terluar (studi kasus) tahun 2014. Media dan pencitraan bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Satria Makassar (2014-2015). Warkop sebagai lumbung wacana, benarkah ? (studi analisis) tahun 2014 bekerjasama dengan Indek Politika Indonesia. Menakar figur politik di Pilkada Gubernur Sulsel tahun 2017 bekerjasama dengan LKIS. Kebudayaan ditapal batas (studi referensi) 2017. Melacak patahan warga perantau Bugis di Belitung (2018). Politik melawan kotak kosong di Makassar (2018). Membaca politik identitas, studi kasus Pilgub DKI

(2017). Memahami politik kotak kosong tahun 2016. Penelitian bersama tentang stunting di Propinsi Bangka Belitung (2022). Dan beberapa penelitian kelompok dengan dosen dan lembaga eksternal. Demokrasi lokal, dan fenomena politik kotak kosong di Indonesia.

Ekstra **kegiatan**

Pembicara di berbagai media, baik Televisi maupun Radio. Penulis diberbagai media, baik online maupun cetak, regional maupun nasional. Pengampus sekolah kepenulisan Lider Phinisi Universitas Negeri Makassar. Pengampus sekolah Sosial Kritis di HMI Cabang Makassar. Pengampus pada sekolah kepenulisan Filosofia Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan beberap sekolah kepenulisan lainnya. Host Talk Show di Radio BFM Belitung. Panelis Debat Calon Bupati Kabupaten Enrekang tahun 2003. Host pada Debat Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2003. Nara sumber di Televisi Makassar. Nara sumber di OASE NET TV tahun 2015-2018. Nara Sumber di MNC TV tentang Konflik KPU dan Adat di Kabupaten Gowa. Nara sumber ANTV tentang Profile Ketokohan di Sulawesi Selatan tahun 2018. Nara Sumber di Sulawesi TV tentang Fenomen Politik Kosong di Makassar tahun 2018. Nara sumber di Fajar TV dalam topik Mabbicara dalam tema Independensi seleksi anggota KPU Propinsi Sulawesi Selatan. Nara sumber di Bosowa TV dalam tema Makassar bicara. Nara sumber di Radio Prambors Makassar dalam tema Politik dan rezim. Nara sumber di RRI PRO 4 Nusantara Makassar dalam acara Dialog kebudayaan daerah. Nara sumber di Radio Praja Kabupaten Belitung. Nara

sumber di Radio BFM Kabupaten Belitung, sekaligus penyiar radio BPM Belitung. Guru tamu di beberapa sekolah. Tenaga pengajar di BLK Belitung. Tenaga pengajar Kosmologi perempuan di HMI Babel Raya. Dan sampai saat ini masih aktif mengisi kajian, seminar, diskusi dan beberapa agenda pendampingan. Dan narsum di FGD Komisi Informasi Publik Propinsi Bangka Belitung.

Dan beberapa karya yang telah ditulis sebagai berikut :

Tauhid sebagai Paradigma Politik (2005). Membangun Ahlak Politik (2007). Ketika Rakyat Harus Memilih (2007). Pembangkangan Civil Society (2007). Politik Tanpa Identitas (Edisi I, 2015). Politik Tanpa Identitas (Edisi II, 2016). Politik Tanpa Identitas (Edisi III, 2017). Kalimat Yang Tak Berpihak (2017). Jatuhnya Kata-Kata (2017). Politik Kebangsaan (2018). Obituari Demokrasi (2018). Syair-Syair Pembebasan (2015). SYL mulai Gila (Gigih di Lapangan), (2016). Perempuan di Tepian (2015). SYL dalam SWOT (2016). Dialektika SYL (2017). Rindu di bawah Rembulan (Inspiring sang ayah, 2015). Antologi Puisi, Cinta dan Nyanyian Hujan (2017). Merobek Demokrasi (2018). Kata Harus diBaca (2017). Mata Kata (2005). Puisi di Makkareso (2017). Memungut Cinta di Atas Sajadah (Novel, 2018). Mencuri Paras (Novel, 2018). Pemberi Testimoni dalam buku 98-99 (2018). Pemberi Testimoni dalam buku Menerobos Takdir (2018). Titik Nol Kilometer Kabupaten Sinjai (2015). Manusia dan Jejak Pengetahuan (2022). RemoTkrasi (2018). Dialektika Syahrul Yasin Limpo (Menteri Pertanian RI) tahun 2019. Tutar Bijak Anak LorongTa (Danny Pomanto Walikota Makassar). EUONIA sang Srikandi (2020). Batas yang tak bertepi (2022). Meniti kerikil, mendaki bukit (2022). Potensi

Maritim Di Bangka Belitung (2023). Tutar Bijak Tamsil Linrung (2022). Stannia Kamu Di mana (Novel cetakan I 2024). Elegi Kekuasaan (2024). Catatan Cacat-an Demokrasi (2024). Hukum dalam pusaran politik (2024). Mahar politik, ancaman demokrasi (2024). Legal Tragedy Dalam Politik (2024). Politik mahar, Mahar politik (2025) Pojok Kata (2025), Novel Stannia kamu Di mana (Cetakan II, Februari 2025). Dramaturgi Demokrasi (2025). jalan Terjal Demokrasi (2025). Demokrasi dalam perspektif Administrasi publik dan politik (2025). Dan beberapa karya yang ditulis oleh beberapa kelompok penulis lainnya. Tulisan opini sekitar 1000 judul di berbagai media cetak baik lokal maupun nasional. Dan beberapa paper presentasi.